

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
TANAMAN PORANG DI KABUPATEN SINJAI**



Disusun dan Diajukan Oleh :

MIFTAHUL HAERAT

Nomor Stambuk Mahasiswa : 105611108017

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
TANAMAN PORANG DI KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MIFTAHUL HAERAT

Nomor Stambuk : 105611108017

08/09/2021

1 exp
smb. Alumni

R/0163/ADN/21 CD
HAE

P'

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani
Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai
Nama Mahasiswa : Miftahul Haerat
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11080 17
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Isa Ansari, M.Si



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos, MPA

NBM: 730727

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0205/FSP/A.4-II/VIII/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari senin tanggal 30 bulan agustus tahun 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

)

2. Dr. Jaelan Usman, M.Si

)

3. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

)

4. Riskasari, S.Sos.,M.AP

)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : MIFTAHUL HAERAT

Nomor Induk Mahasiswa : 105611108017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasilplagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Miftahul Haerat

ABSTRAK

Miftahul Haerat. Muhammad Isa Ansari dan Fatmawati. 2021. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator, inovator, modernisator dan pelopor dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yang ditetapkan secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan 4 (empat) indikator peran pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sinjai, yaitu: 1) Sebagai Fasilitator, kehadiran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang ini sangat berperan penting karena dapat memberikan informasi kepada petani tentang tanaman porang dan pemerintah juga memfasilitasi petani dengan memberikan bantuan modal usaha dan bibit porang 2) Sebagai Inovator, Pemerintah memberikan inovasi kepada petani tentang teknik-teknik budidaya porang dan pemerintah bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan CV. Celebes untuk memperoleh bantuan modal usaha 3) Sebagai Modernisator, Pemerintah mengiringi petani kearah kehidupan modern yakni kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya penggunaan traktor untuk menggemburkan tanah serta kemampuan mengolah kekayaan alam 4) Sebagai Pelopor, Pemerintah menjadi panutan untuk petani, misalkan mengelolah bahan-bahan dulunya hanya mencemarkan lingkungan dan sekarang bisa diolah dan dimanfaatkan oleh petani.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Petani, Tanaman Porang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya menyusun skripsi yang berjudul **Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang di Kabupaten Sinjai**, tepat pada waktunya. Selawat serta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang menerang seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan Kepada orang tuaku tercinta **Ayahanda Suardi dan Ibunda Nurdiana** atas segala pengorbanan, kesabaran, doa

dan kasih sayangnya dalam membesarkan dan mendidik penulis, tanpa pernah mengeluh serta selalu memberikan kekuatan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk itu rasa terimakasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Nasrul haq, S.Sos., MPA. Selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Dr. H. Muhammad Isa Ansari, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan dorongan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini
5. Dr. Abdi, M.pd selaku penasehat akademik saya yang selalu memberikan dorongan-dorongan positif dan motivasi untuk semangat mengerjakan tugas akhir ini.
6. Ayahanda Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos.,M.Si dan Ibu Rahma Nur, S.Pd, M.Pd selaku orang tua saya di Makassar yang selalu memberikan dorongan-dorongan positif serta motivasi dan semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini
7. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas jerih payahnya membimbing penulis selama di bangku perkuliahan

8. Seluruh pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai yang telah memerikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakn penelitian serta ketersediaan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis
9. Kepada saudari perempuan saya Riska Adilah, Amd. RMIK yang selalu memberikan bantuan, motivasi serta iringan Do'a yang tiada henti. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini
10. Kepada sahabatku Queen Bees yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih selalu menemani dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
11. Kepada Ivan Fadillah terima kasih telah memberikan semangat dan selalu membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini .
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas IAN-B Angkatan 2017 dan semua pihak yang membantu dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini yang dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, kami menyadari penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif untuk mencapai kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh

Makassar, 21 Agustus 2021


MIFTAHUL HAERAT



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep Peran Pemerintah Dalam Pembangunan	11
C. Pemberdayaan Masyarakat	18
D. Pemberdayaan Petani Tanaman Porang	22
E. Kerangka Pikir.....	24
F. Fokus Penelitian	25
G. Deskripsi Fokus.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Pengabsahan Data	32
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Vokasi Penelitian.....	34
B. Peran Pemeritah dalam Pemberdayaan Petani Taaman Porang di Kabupaten Sinjai.....	50

C. Pembahasan	58
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terahulu	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian	31
Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Sinjai	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sinjai	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas TPHP Kabupaten Sinjai	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah merupakan organisasi dari berbagai negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Adapun pengertian pemerintah dalam arti luas yaitu menunjuk kepada alat perlengkapan negara sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas. Kemudian pemerintah dalam arti sempit yaitu hanya menunjuk kepada alat perlengkapan negara yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit. Peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat didalam suatu Negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang ada diatas Mifta Thoha (2002) juga berpendapat, peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut dapat dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya.

Adapun Peran pemerintah dalam pembangunan menurut (Siagian, 2000) terdapat beberapa indikator yaitu, peran sebagai fasilitator, peran sebagai innovator, peran sebagai modernisator dan peran sebagai pelopor. Berdasarkan indikator yang ada, pemerintah harus menyelenggarakan peradillan yang mana peradillan itu harus merata untuk semua lapisan masyarakat. Adapun peran dan fungsi pemerintah yang berkaitan dengan

pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. dalam pemberdayaan masyarakat yang optimal dapat memberdayakan diri menjadi lebih baik dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam.

Salah satu peran pemerintah dalam mensejahterakan petani yaitu pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan petani agar jumlah rakyat miskin di Indonesia tidak terus bertambah. Karena dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka akan meningkat pula ketahanan pangan Indonesia. Dimana diperlukan hukum pertanian yang dapat mengatur dan melindungi pertanian, khususnya kesejahteraan para petani tanaman porang.

Sementara itu untuk mendongkrak Pertanian di masa pandemi Covid-19 tanaman umbi porang menjadi komoditas yang menjanjikan. Tanaman umbi porang juga menjadi komoditas ekspor yang memiliki nilai jual tinggi, tetapi saat ini pembudidayaannya masih bersifat perorangan. Peran pemerintah juga diperlukan sebagai pondasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus sebagai penguatan ketahanan pangan di masa pandemi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis Muhammad Lutfi (2019) dengan judul “Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui peran dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dalam pemberdayaan kelompok tani yang berada di desa sukoreno kecamatan jember. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kelompok tani tidak dapat berkembang menjadi kuat dan mandiri. Oleh karena itu disebabkan pemerintah belum bisa sepenuhnya melaksanakan ketiga aspek dengan baik yang dijadikan tolak ukur pemerintah yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan kelompok tani berkembang, peran pemerintah memperkuat potensi daya yang dimiliki kelompok tani dan peran pemerintah dalam melindungi kelompok tani.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan bisa berhasil menjadi salah satu komoditas pertanian andalan utama. Untuk itu, pemerintah akan mempersiapkan regulasi berkaitan dengan tata niaga hasil tanaman porang. Tanaman porang ini jika dikembangkan, hasilnya sungguh luar biasa. Karena umbunya yang besar ini bisa dijadikan sebagai bahan baku aneka plahan seperti tepung pengganti beras, kecantikan hingga lem perekat. Syahrul juga menjelaskan porang merupakan jenis tanaman hutan tropis yang sudah dikembangkan sejak tahun 2020. Nantinya akan dilindungi dengan beberapa regulasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dicapai karena porang tidak tumbuh di banyak Negara. Karena itu menteri pertanian bekerjasama dengan kepala daerah melakukan percepatan pertanian dengan langkah terobosan untuk meningkatkan komoditi ekspor tersebut. Kementerian pertanian melalui direktorat jenderal tanaman pangan saat ini sedang mengkaji aturan dan bantuann bibit porang. Seperti

diketahui bahwa tanaman porang sampai saat ini belum dilepas oleh menteri pertanian, sehingga masih terkendala dalam penggunaan anggaran pemerintah untuk mengembangkan secara luas tanaman porang ini. Oleh karena itu perlu didorong agar tanaman porang segera dilepas. Apabila tanaman ini sudah lepas, maka peredarannya dilindungi secara regulasi. (sumber: bbppmbtph tanamanpangan.pertanian)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang pelepasan Varietas tanaman sebagai pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan Varietas tanaman pangan baru, yang memuat ketentuan mengenai uji adaptasi, uji ketahanan hama dan penyakit, uji mutu hasil, uji potensi produksi benih, dan uji petak perbandingan sebagai persyaratan dalam pelepasan Varietas.

Direktur jenderal tanaman pangan menekankan agar petani bisa menyerap KUR sehingga budidaya porang kedepan tidak mengalami hambatan dan memberikan keuntungan bagi petani. Tanaman porang memiliki potensi sebagai tanaman ekspor yang sampai saat ini bahan bakunya masih sangat kurang sehingga tanaman ini menjadi sumber ekonomi baru bagi petani, khususnya di Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 27 “Dinas tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku “ .

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu sentral tani di kebun maupun sawah sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani. Hasil yang diproduksi biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada pula yang dijual dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pendapatan usaha tani di kebun maupun di sawah yang diterima oleh penduduk di Kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh penerimaan produksi tani.

Kepala Dinas TPHP Sinjai sangat mensupport petani dalam membudidayakan tanaman porang karena tanaman porang saat ini menjadi komoditas yang sangat menjanjikan dan pembudidayaannya terus meningkat. Dengan membudidaya tanaman porang kesejahteraan petani dapat meningkat karena tanaman porang memiliki nilai jual yang tinggi. Adapun kelebihan dan manfaat tanaman porang sehingga petani memilih mengembangkannya karena tanaman porang saat ini merupakan komoditi baru dan nilai eksportnya sangat tinggi adapun manfaat tanaman porang yaitu digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, selain juga untuk pembuatan lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke Negeri Jepang dan Cina.

Dari uraian latar belakang yang ada diatas dan beberapa asumsi yang menarik, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai ”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang di Kabupaten Sinjai. Agar penelitian ini dapat menyuguhkan uraian yang benar dan jelas, maka perlu diberi batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Petani Porang Di Kabupaten Sinjai ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Innovator Dalam Pemberdayaan Petani Porang Di Kabupaten Sinjai ?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Modernisator Dalam Pemberdayaan Petani Porang Di Kabupaten Sinjai ?
4. Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Pelopor Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Petani Porang Di Kabupaten Sinjai ?
2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Sebagai Innovator Dalam Pemberdayaan Petani Porang Di Kabupaten Sinjai ?

3. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Sebagai Modernisator Dalam Pemberdayaan Petani Porang Di Kabupaten Sinjai ?
4. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Sebagai Pelopor Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai?

D. Manfaat penelitian

Dilakukannya penelitian ini tentunya akan memberikan kegunaan bagi penulis, adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan atau literatur tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai.
- b. Sangat besar harapan bagi peneliti kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Sinjai untuk lebih memaksimalkan lagi perannya dalam pengembangan tanaman porang. Hal tersebut perlu dilakukan karena perkembangan ekonomi suatu daerah tergantung pada bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada serta tergantung pada kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kajian tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian Muhammad Lutfi (2019) "Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember".
2. Dalam penelitian Asril Gunawan (2017) "Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri".
3. Dalam penelitian Antoni Prasetio (2019) " Peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Tanjung Jabung Timur".

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Tahun (Judul)	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1	Muhammad Lutfi (2019) Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	Untuk mendiskripsikan bagaimana Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan dalam pemberdayaan kelompok tani.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan sampel yang digunakan ialah Purposive Sampling yaitu sampel diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	peran pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Jember melalui penyuluh pertanian lapangan untuk menciptakan potensi kelembagaan kelompok tani didalam penguatan kelembagaan kelompok masih kurang karena pernyataan anggota bahwa tidak adanya program tentang penguatan kelembagaan kelompok yang dibrikan oleh pemerintah sehingga kelompok tani masih belum bisa kuat dan mandiri. Kemampuan anggota didalam menjalankan usaha taninya masih kurang karena sumberdaya manusia anggota kelompok tani lemah dan tidak memiliki pemikiran yang kreatif. Kelompok tani juga belum bisa menjalankan

fungsinya dengan baik karena kurangnya kekompakan dan komunikasi antar anggota tidak berjalan sehingga upaya pemerintah untuk peningkatan kemampuan kelompok tani menjalankan fungsinya tidak dapat diterapkan oleh kelompok tani sejahtera dan kelompok tani bahagia.

Peran pemerintah untuk memperkuat potensi daya yang dimiliki kelompok tani sudah diterapkan melalui penyuluh pertanian lapangan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani sejahtera dan kelompok tani bahagia. Namun penyuluhan tentang pemberdayaan kelompok tani yang diberikan tidak dapat diterapkan dengan baik karena kelompok tani masih banyak yang menggunakan metode tradisional yaitu cara yang digunakan secara turun temurun yang sangat melekat. Untuk permodalan kelompok tani sejahtera dan bahagia ini

				<p>pemerintah tidak memfasilitasi atau membantu kelompok tani didalam permodalan usaha taninya sehingga kelompok tani menggunakan modal sendiri. Pemerintah juga memberikan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada kelompok tani sejahtera dan bahagia dengan memberikan ilmu-ilmu baru yang dapat kelompok tani menjadi lebih moderen didalam mengelola usaha taninya. Serta memberikan pengetahuan tentang teknologi baru yang dapat mempercepat didalam proses usaha taninya dan memberikan informasi baru tentang penemuan penyakit yang dapat menyebabkan tanaman kelompok tani menjadi rusak.</p>
2	Asril Gunawan (2017) Peran Dinas Pertanian Tanaman	1. Untuk mengetahui peran yang dihadapi Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui cara observasi, wawancara	Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui

<p>Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri</p>	<p>Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecamatan Indrapuri</p> <p>2. Untuk mengetahui tantangan pembangunan pertanian</p>	<p>a,dan dokumentasi.</p>	<p>pembentukan capital, penyerap tenaga kerja, sumber devisa Negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional 73 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indrapuri telah mampu meningkatkan produksi beras diatas 5 persen. Produksi padi yang meningkat pada tahun 2016 yang mencapai rata-rata 7,2 ton per hektar sehingga mencapai surplus bagi indrapuri, yang merupakan komoditi andalan dari Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Aceh Besar</p> <p>Tantangan pembangunan pertanian di Indrapuri adalah memperbaiki produktifitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian ramah lingkungan. Persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat indrapuri disektor pertanian pada saat ini dan dimasa akan datang adalah meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Perubahan iklim global Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.</p>
3	Antoni Prasetyo (2019) Peran Dinas	1. Ingin mengetahui peran dinas tanaman pangan dan	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan	Dinas tanaman pangan dan hortikultura mempunyai peran sangat penting dalam perlindungan lahan pertanian

<p>Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Tanjung Jabung Timur</p>	<p>hortikultura Tanjung Jabung Timur terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP B)</p> <p>2. Ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dinas tanaman pangan dan hortikultura Tanjung Jabung Timur terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>3. Ingin mengetahui upaya dinas tanaman pangan dan hortikultura Tanjung Jabung Timur dalam mencegah lahan yang dialih fungsikan</p>	<p>deskriptif kualitatif</p>	<p>berkelanjutan, karena dengan adanya dinas tersebut bisa mengurangi pencegahan alih fungsi lahan, dengan program mencetak lahan sawah yang baru.</p> <p>Program sosialisasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, diharapkan masyarakat sadar terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Dinas tanaman pangan dan hortikultura menyampaikan bahwa apa yang diinginkan maupun kebutuhan masyarakat maka nantinya akan dilaksanakan MUSRENBANG (musyawarah rencana pembangunan), dimana para petani dapat menyampaikan keluhan tentang apa saja yang dibutuhkan. Dengan adanya musrenbang yang diadakan pemerintah terkait maka nantinya menjadi lebih tahu apa saja kekurangan yang menjadi kendala petani tersebut.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Konsep Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

1. Pengertian Peran

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi social, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang berpendapat arti peran yaitu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, ada merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Peran juga dapat didefinisikan sebagai tindakan atau akal yang ditampilkan oleh individu ataupun suatu kelompok sosial (secara kolektif) dalam suatu kondisi tertentu. hal ini searah dengan bolak wirutomo (Nilasari, 2017) menyatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam terjadinya sesuatu hal.

Menurut Alvin L. Bertrand peran yaitu pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono slamet, yang mengartikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S Susanto mengemukakan bahwa peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif.

Para ahli juga menyatakan bahwa secara umum pengertian peran meruakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Barbara (1995:21), menyatakan bahwa peran ialah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. peran dipengaruhi oleh keadaan sosial dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. peran juga dapat menentukan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas adapun pendapat menurut Mifta Thoha (2002), peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut dapat dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah merupakan sebagai organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Adapun pengertian pemerintah secara luas yaitu menunjuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit yaitu hanya menunjuk kepada alat perlengkapan negara yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintah pada umumnya disebut dengan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu/sah untuk melaksanakan kekuasaan dan melindungi serta meningkatkan tarap

hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah juga adalah suatu bentuk kegiatan atau aktifitas dari aparatur negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah diamanatkan untuk mencapai suatu tujuan negara dan kepentingan seluruh masyarakatnya.

3. Peran Pemerintah

Pengertian peran pemerintah menurut W.S. Sayre yaitu sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pada umumnya yang disebut dengan pemerintah yaitu sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu/sah untuk melaksanakan kekuasaan dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Peran pemerintah dan administrasi Negara saling berhubungan karena pemerintah menjalankan pemerintahan terdiri atas pemerintahan politik dan pemerintahan administratif, pelaksanaan teknis nonpolitik (Administrasi Negara) menjalankan pemerintahan dalam arti terbatas dan politik berarti membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. Orientasi politik dalam studi administrasi Negara meletakkan administrasi Negara sebagai salah satu elemen dalam proses pemerintahan, administrasi Negara dipandang sebagai suatu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Administrasi Negara juga memainkan sejumlah peranan

penting diantaranya dalam menyelenggarakan pelayanan public yang mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya suatu Negara. Administrasi Negara juga merupakan studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Yusuf (2014), diperlukan peranan dari pemerintah secara optimal dan mendalam guna memberdayakan masyarakat, oleh karena itu dibawah ini merupakan penjelasan beberapa peran pemerintah yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Sebagai regulator pemerintah berperan untuk menyiapkan arahan dan acuan yang mendasar guna menciptakan keseimbangan pembangunan dengan menerbitkan peraturan. Pemerintah yang dianggap sebagai instrumen dalam beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator pemerintah yang kemudian menggerakkan partisipasi dari masyarakat jika terjadi beberapa kendala dalam proses pembangunan agar dapat meningkatkan dan memelihara dinamika pembangunan di daerah. Peran pemerintah yang dimaksudkan adalah dengan memberikan bimbingan serta arahan-arahan secara mendalam terhadap masyarakat. Pemberian bimbingan

biasanya diwujudkan melalui tim penyuluh tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator elit politik atau pemerintah berpacu pada bidang pendampingan dan pelatihan, pendidikan, serta dalam meningkatkan keterampilan, dan bidang pendanaan atau pemberian bantuan modal untuk masyarakat yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian terpenting yang harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah. Sebagaimana dalam pemberdayaan pemerintah mempunyai peran baik sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang tentunya tidak hanya sekedar jadi sebutan semata. Namun, perlu diimplementasikan agar ucapan dan prakteknya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah harus jeli melihat keadaan yang ada pada masyarakat, kemudian selalu mencari alternatif alternatif lain untuk membantu masyarakat untuk mencari ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam konteks pemberdayaan.

Adapun beberapa indikator yang tercantum dalam 5 (lima) peran pemerintah untuk pembangunan (Siagian, 2000), antara lain :

1. Peran Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang kondusif atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitasi dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. Salah satu tugas fasilitator diantara ada dua yang mendasar, yaitu:

- a. Fasilitator di Bidang Pendampingan. Dimana Pendampingan ini bisa diimplementasikan dengan pemberian pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.
 - b. Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu membantu petani mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan.
2. Peran sebagai inovator, pemerintah memiliki peran salah satunya selaku inovator yaitu memberikan inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru dan menjadi sumber dari hal-hal baru.

Prakondisi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif antara lain:

- a. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi.
- b. Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu.

- c. Inovasi yang sifatnya kondepsional.
- d. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Kemampuan sebagai inovator pembangunan. Yaitu kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

3. Peran sebagai modernisator, yaitu pemerintah bertugas mengiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang ada sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan rakyat maupun mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan.
4. Peran sebagai pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat, baik buruknya perilaku yang dipraktikan oleh orang-orang yang berada di lembaga pemerintahan juga memberikan pengaruh besar terhadap psikologi masyarakat yang melihat dan memahaminya. karena ketika pemerintah mengeluarkan statement akan suatu (dilarang korupsi) tetapi mereka (orang-orang parlemen) yang melakukan hal tersebut.

Sehingga pada akhirnya tumbuh lah rasa ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah.

5. Peran sebagai pelaksanaan diri, pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan Negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai.

Berdasarkan pengertian yang ada di atas, pemerintah harus menyelenggarakan peradilan yang mana peradilan itu harus merata untuk semua lapisan masyarakat. Jadi, peran pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan

masyarakat adalah proses siklus terus menerus, proses partisipasi dimana masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha dalam mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan melalui beberapa kegiatan peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan lembaga keuangan, pengembangan usaha ekonomi serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya memberdayakan kelompok yang terutama dinilai lemah dan rentan terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan. Istilah pemberdayaan seringkali tumpang tindih dengan istilah pembangunan meskipun keduanya memiliki kaitan yang sangat erat antara satu sama lain, namun bagaimanapun juga konsep pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata "Empowerment" sedangkan kata pembangunan merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata "Development".

Dalam pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berbasis rakyat dan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial tetapi bisa mendukung kegiatan pembangunan yang

digerakkan oleh pemerintah, dimana masyarakat juga bisa berperan lebih besar dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Adapun yang menjadi tugas penting manajemen pembangunan dalam membimbing, mengarahkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah dengan segala keterbatasannya belum bisa melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya pranata-pranata sosial yang ada tetapi juga penguatan individu sehingga dapat menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, keterbukaan, hemat dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dibagi menjadi tiga upaya pokok yaitu :

- a. Dapat menciptakan potensi masyarakat berkembang (enabling),
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering).
- c. Dapat melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah.

2. Tujuan Pemberdayaan masyarakat

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Dimaksudkan agar supaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya

- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan dan segala bentuk keterbelakangan. Dengan demikian kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak senantiasa tergantung pada individu seras kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat dapat diciptakan melalui kegiatan yang dilakukan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Untuk mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya dapat ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efektif, efisien, akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Yang dimana perilaku dan budaya dapat memiliki peran yang sangat penting sehingga dapat mempercepat proses perubahan terhadap masyarakat sehingga dapat terbangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri untuk pencapaian suatu tujuan pembangunan masyarakat.

3. Jenis Pemberdayaan Masyarakat

Adapun jenis pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Sikap radikal

Sikap radikal merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam membentuk segala upaya pembangunan masyarakat

melalui sistem kekuatan. Dimana sistem ini dipaksakan sebagai paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat.

b. Sikap kebersamaan

Sikap kebersamaan merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan seluruh masyarakat.

Kebersamaan ini dapat dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan dan golongan dalam masyarakat.

c. Pendekatan dengan sistem gagasan

Selanjutnya sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan, sistem ini secara tidak langsung stimulasi daripada memberikan power kepada powerless. Keadaan ini bisa dikordinir masyarakat melalui interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan menimbulkan integrasi kepentingan bersama.

D. Pemberdayaan Petani Tanaman Porang

Pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, serta penguatan kelembagaan Petani perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan agar petani memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih sejahtera.

Tanaman porang merupakan sala satu kekayaan hayati umbi-umbian yang ada di Indonesia selain itu, tanaman porang juga sebagai tanaman penghasil karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dan serat pangan.

Pemanfaatan tanaman porang sebagai bahan pangan dan dapat di ekspor sebagai bahan baku industry dengan demikian tanaman porang belum secara luas dibudidayakan. Pada umumnya petani hanya mengambil serta memanfaatkan tanaman yang tumbuh liar di hutan di bawah rumput bambu, di sepanjang bantaran sungai dan lereng-lereng gunung. Selain itu pertumbuhan porang mempunyai dua fase yang sering muncul secara bergantian yaitu fase generative dan vegetative.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 1, ayat 1 Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan petani setelah banyak permintaan dari mancanegara. Padahal, tanaman porang ini dulunya sama sekali tidak dipandang dan dukungan dari pemerintah. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang gencar dalam mengembangkan tanaman porang dan akhir-akhir ini cukup populer karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman porang sangat bermanfaat, namun sebagian masyarakat belum terlalu mengetahui jenis tanaman ini. Padahal tanaman porang banyak diminati di jepang dan china. Tanaman porang masih perlu dikembangkan secara lebih luas karna porang dapat dijadikan makanan yang rendah karbohidrat dan sangat cocok untuk penderita diabetes. Ada beberapa

kabupaten di Sulawesi selatan yang membudidayakan tanaman porang . seperti Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Sidrap, dan Luwu.

Tanaman porang berkembang baik karena hampir semua kabupaten sudah membudidayakan, banyak petani yang tertarik membudidayakan tanaman porang karena harga yang bagus dan permintaan sangat tinggi dari mancanegara. Pemeliharaan tanaman porang tidak serumit tanaman lain walaupun masa panennya cukup lama, bisa setahun hingga dua tahun. Di daerah Sulawesi Selatan khususnya di Makassar sudah ada empat hingga lima pabrik yang siap membeli porang.

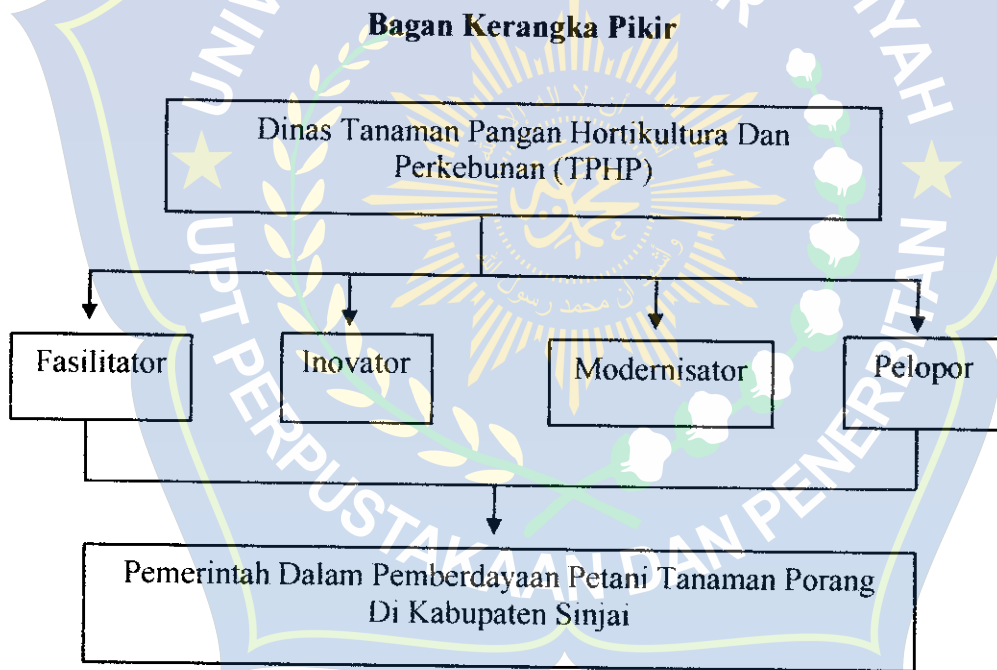
Tanaman porang sebenarnya sudah bertahun-tahun ditanam masyarakat tapi baru kali ini pemerintah hadir untuk meningkatkan produksi karena pasar sudah jelas. Tanaman porang memiliki potensi sebagai tanaman ekspor yang saat ini bahan bakunya masih sangat kurang.

E. Kerangka Pikir

Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang merupakan langkah awal yang diciptakan pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk konsep pemikiran yang dituangkan serta pelaksanaannya ditengah masyarakat.

Untuk melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai dapat dilihat melalui teori yang dikemukakan oleh Siagian (2000), dalam teorinya terdapat 5 indikator yaitu sebagai fasilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan diri. Dari ke 5 indikator peneliti hanya menggunakan empat indikator sesuai dengan

pembahasan yang ada dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, inovator, modernisator, dan pelopor. Adapun alasan peneliti hanya menggunakan 4 indikator karena menurut peneliti ke 4 indikator ini termasuk dalam tanggung jawab pemerintah sedangkan pada indikator pelaksanaan diri dimana termasuk dalam tanggung jawab nasional karena dalam pelaksanaan diri tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Untuk lebih jelas dapat dilihat bagan berikut.



Gambar 2.1: Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang ada di atas, maka fokus penelitian ini berfokus pada Peran dinas tanaman pangan hortikultura

(TPHP) dalam pengembangan tanaman porang bagi petani di kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai.

Dengan menggunakan teori Siagian (2000) sebagai berikut :

1. Peran sebagai fasilitator
2. Peran sebagai inovator
3. Peran modernisator
4. Peran sebagai pelopor

G. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Peran Sebagai Fasilitator

Pemerintah bergerak di bidang pendampingan, yang dimana Pendampingan ini dapat diimplementasikan melalui:

- a. Pemberian pelatihan, yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang oleh dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok tani. Adapun pelatihan yang diberikan kepada petani yaitu pelatihan penggunaan alat pertanian.
- b. Peningkatan keterampilan petani tidak lepas dari bimbingan dan bantuan penyuluh pertanian dari dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Penyuluh pertanian yaitu pendidik non formal bagi petani yang merupakan kegiatan peningkatan keterampilan dalam bertani dan pengetahuan tentang pertanian.

2. Peran sebagai innovator

Peran pemerintah sebagai innovator yaitu pemerintah memberikan inovasi baru dan hal-hal baru kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kepada setiap kelompok tani tanaman pangan atau mengadakan sosialisasi tentang bagaimana cara budidaya tanam yang baik sehingga dapat memberikan gambaran atau mengubah pola pikir petani bahwa dengan adanya inovasi baru tentang cara budidaya tanam dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil kualitas maupun kuantitas produksinya, serta dapat meringankan pekerjaan petani dalam pengolahan lahan.

3. Peran sebagai modernisator

Sebagai modernisator pemerintah bertugas mengiring masyarakat kearah kehidupan modern yakni kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.

4. Peran sebagai pelopor

Sebagai pelopor pemerintah harus menjadi panutan untuk seluruh masyarakat dan menjadi Pelopor dalam bentuk hal-hal positif, misalnya pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga petani dapat mengusahakan dan memanfaatkan sendiri sumber daya alam yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal. Mulai dari 2 Juni sampai 2 Agustus 2021

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (TPHP) yang ada di Kabupaten Sinjai. Maksud penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang di Kabupaten Sinjai

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu peneliti harus terjun langsung dilapangan untuk melakukan observasi sehingga dapat melihat langsung keadaan yang sebenarnya mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran, mendeskripsikan, dan menjelaskan data, informasi ataupun pengalaman informan yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Prang Di Kabupaten Sinjai.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ada 2 yaitu:

1. Primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.
2. Sekunder yaitu data atau informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk digunakan dan melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder juga bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini ialah orang yang dipilih karena dianggap banyak mengetahui dan dapat terlibat langsung dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai. Peneliti telah menentukan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Jumlah informan
1	Ir. Sudirman., M.Si	IS	1
2	A. Irmawati Yusuf, SP., MM	IY	1
3	Alimuddin, SP	AM	1
4	Sudirman, SP	SR	1
5	Kartini, SP	KN	1
6	Andi Azikin	AA	1
7	Andi Firman	AF	1
	Jumlah		7

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat melihat dan menarik kesimpulan terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai.

2. Teknik wawancara

Wawancara dilakukan agar memperkuat kesimpulan yang diperoleh hasil observasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab

langsung secara lisan dengan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

3. Teknik dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk mengambil gambar yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti gambar kantor, struktur organisasi dan personalia, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang telah dilakkan melalui metode observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang dilakukan sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam penelitian ini digunakan teknis analisis data model Miles dan Huberman mulai dari proses reduksi data hingga verifikasi data. Berikut teknik pengumpulan data yang perlu diketahui, meliputi:

1. Reduksi kata

Tahap awal yang dilakukan ketika reduksi data adalah memilah-milah data baik yang data primer maupun data sekunder kedalam bagian-bagian sesuai dengan kode pertanyaan yang sama. Data yang kemudian tidak digunakan akan dieliminasi agar tidak mengganggu proses analisis. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah proses analisis data.



2. Penyajian data

Setelah dilakukan pemilahan terhadap data yang telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun data tersebut kedalam kalimat-kalimat yang berguna untuk menjelaskan hasil penelitian. Data yang sesuai pembahasan kemudian disusun secara sistematis kedalam paragraph maupun table agar mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Ditahap ini, langkah yang dilakukan yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah dipilah dan disusun. Dari data yang telah terpilih tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang ada dirumusan masalah bagian awal.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber, teknik dan waktu. Adapun tiga macam trigulasi data yaitu:

1. Triangulasi Sumber yaitu cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian dari beberapa sumber tersebut, data dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pandangannya sama atau tidak.
2. Triangulasi Teknik yaitu cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu yaitu pengecekan data yang dilakukan dengan waktu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan judul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang di Kabupaten Sinjai. Pada hasil penelitian ini juga akan memaparkan tentang profil Kabupaten Sinjai dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) di Kabupaten Sinjai.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum kabupaten sinjai

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak di jazirah timur bagian Selatan Sulawesi Selatan, dan secara astronomis terletak antara $5^{\circ} 19' 50''$ - $5^{\circ} 36' 47''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ} 48' 30''$ - $120^{\circ} 10' 00''$ Bujur Timur. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah 819,96 Km².

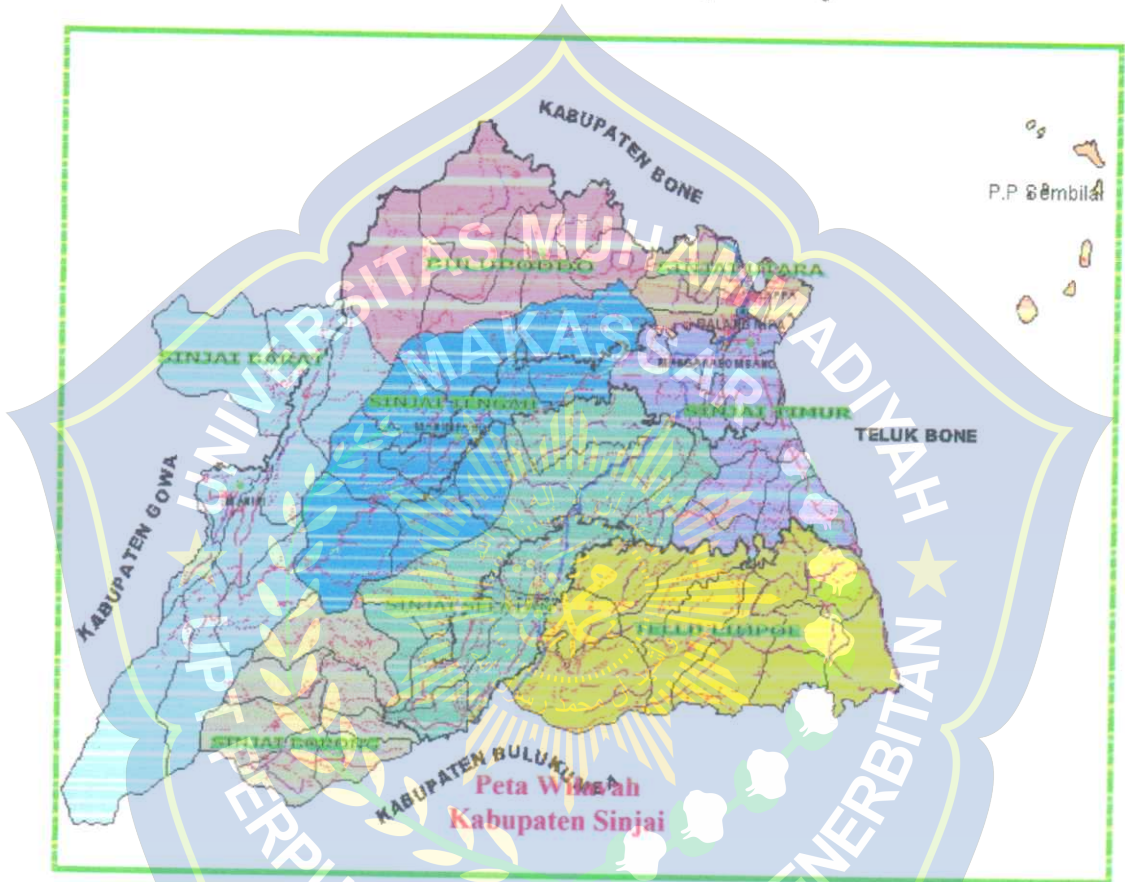
Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 Kecamatan, yang meliputi 67 desa dan 13 Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab. Bone
- Sebelah Barat : Kab. Gowa
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulukumba

Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis dan luas wilayah dapat dilihat pada gambar 1 mengenai Peta Administrasi Kabupaten Sinjai,

dan tabel 1 yaitu luas wilayah dan jumlah desa setiap kecamatan di Kabupaten Sinjai.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sinjai



Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim Sub Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 120 Deep rain pertahun. Musim Hujan dimulai Februari s/d Juli dan musim panas mulai Agustus s/d Oktober serta kelembaban mulai November s/d Januari. Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter diatas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 4,62 persen berada pada ketinggian 25 m diatas permukaan laut, 9,74 persen berada pada ketinggian 100 m

diatas permukaan laut, 55,35 persen berada pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut, 21,18 persen berada pada ketinggian 500 – 1000 m dari permukaan laut dan 21,18 persen berada pada ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut.

Kabupaten Sinjai terdiri atas 8 Kecamatan, 13 kelurahan, 61 desa, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 819,96 Km², atau 1,29 persen dari luas wilayah daratan Propinsi Sulawesi Selatan. Dari 8 Kecamatan itu, terdiri dari 68 desa/Kelurahan.

Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Sinjai

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Sinjai Barat	9
2	Sinjai Borong	8
3	Sinjai Belatan	11
4	Sinjai Timur	13
5	Sinjai Tengah	11
6	Sinjai Utara	7
7	Bulupoddo	10
8	Tellulimpoe	11
9	Pulau Sembilan	4
	Jumlah	73

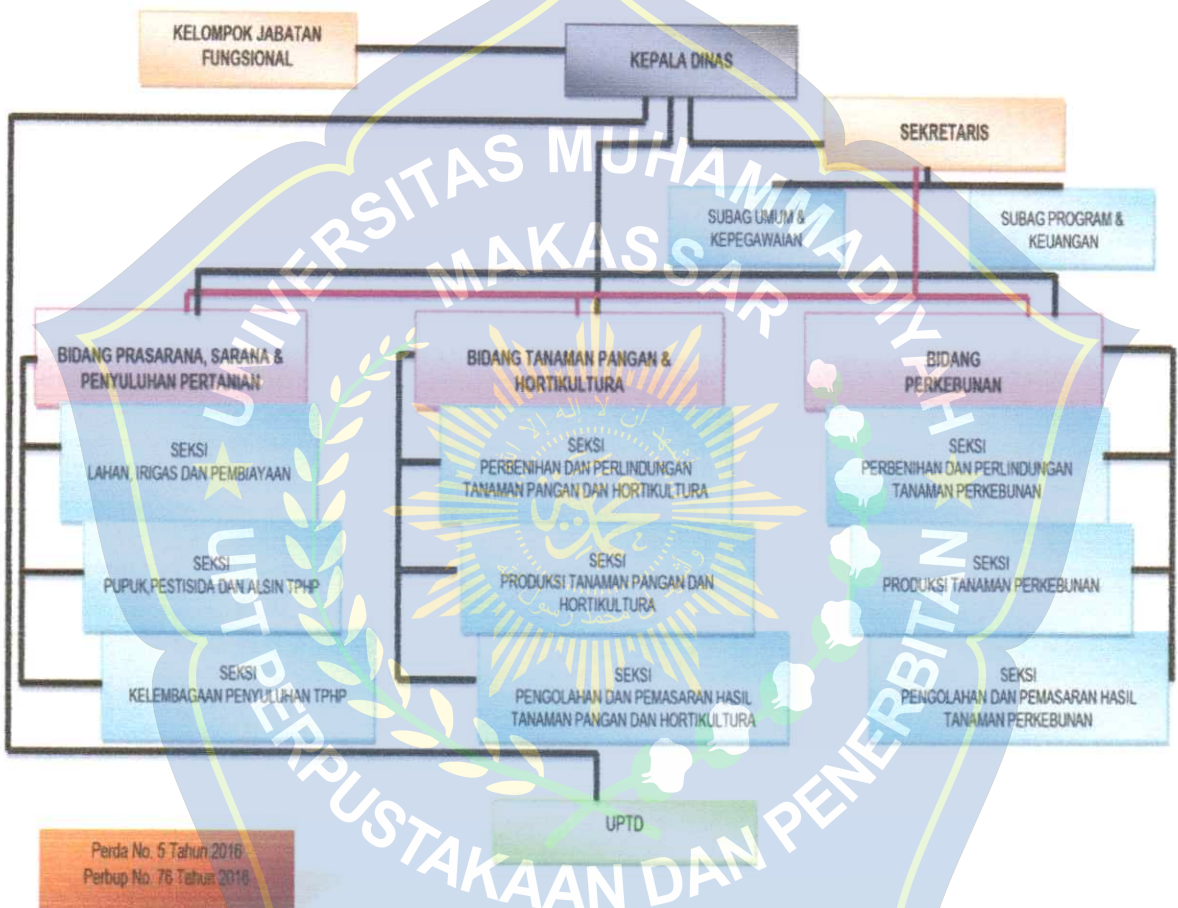
2. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Tphp)

Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (TPHP) terletak di Jl. Persatuan Raya No. 121, Biringere, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup pemerintah kabupaten sinjai dengan predikat sebagai instansi teknis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten dibidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan kabupaten sinjai berkedudukan selaku unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

A. Struktur Organisasi Dinas TPHP

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas TPHP Kabupaten Sinjai



Berdasarkan struktur organisasi Dinas TPHP memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Sekretariat Sekretariat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi

teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas meliputi

- a. Urusan program dan keuangan; dan
- b. Urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
2. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
 - d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas

- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan dinas
 - f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
 - d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi :
- a. Lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - b. Pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan

- c. Kelembagaan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - d. Pelaksanakan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja di bidang lahan, irigasi, pembiayaan dan investasi
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
 - c. Melakukan rancangan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi dan pembiayaan
 - d. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 - e. Melakukan supervisi di bidang pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
7. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsin Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. Melakukan rancangan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyusun rencana kebutuhan pupuk, pestisida, alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melakukan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
8. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan Penyuluhan Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. Menyusun rancangan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan dan ketenagaan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; di bidang penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyusun program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- e. Menyusun materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
9. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi : a.perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; b.produksi tanaman pangan dan hortikultura; c.pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
10. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Menyusun rancangan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikulutra;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

11. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Menyusun rancangan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

12. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Menyusun rancangan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Menyusun bahan dan melakukan bimbingan pengembangan unit pengolah hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- e. Menyusun rancangan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
13. Bidang Perkebunan Bidang Perkebunan , mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan meliputi :
- a. Perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - b. Produksi tanaman perkebunan;
 - c. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - d. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - e. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan.
14. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;

- c. Menyusun rancangan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman perkebunan;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan.
15. Seksi Produksi Perkebunan, mempunyai tugas tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - c. Menyusun rancangan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman perkebunan;
 - e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman perkebunan.
16. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;

- c. Menyusun rancangan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Menyusun bahan dan melakukan bimbingan pengembangan unit pengolah hasil di bidang perkebunan;
- e. Menyusun rancangan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan.

B. Visi misi dinas TPHP

Dalam penyusunan rencana strategis dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan harus mengacu dan diselaraskan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sinjai. Dalam RPJMD 2018-2023, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sinjai adalah :

1. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2018-2023 adalah :
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

2. Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif

- b. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- f. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
- g. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tersebut, yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai adalah ke-3, yaitu : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.

Oleh karena itu, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki dan dengan segenap kemampuan yang ada akan berusaha untuk mensukseskan apa yang menjadi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai periode 2018 s/d 2023.

C. Tugas pokok dan fungsi dinas TPHP

Tugas Pokok Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan penetapan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Penyelenggaraan dan penetapan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Penyelenggaraan dan penetapan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
4. Penyelenggaraan dan penetapan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman

5. Penyelenggaraan dan penetapan pengawasan penggunaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
6. Penyelenggaraan dan penetapan pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
7. Penyelenggaraan dan penetapan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman
8. Penyelenggaraan dan penetapan pengendalian dan pananggulangan bencana alam
9. Penyelenggaraan dan penetapan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
10. Penyelenggaraan dan penetapan pelaksanaan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
11. Penyelenggaraan dan penetapan pemberian rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
12. Penyelenggaraan dan penetapan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
13. Penyelenggaraan dan penetapan pelaksanaan administrasi dinas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai

Deskripsi hasil penelitian merupakan isi dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan fakta yang peneliti temukan dilapangan,

serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang terdapat di bab sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai, terdapat beberapa peran pemerintah menurut Siagian (2000) yaitu, peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai modernisator, peran pemerintah sebagai innovator dan peran pemerintah sebagai pelopor yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai Fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan, yang dimana bidang pendampingan ini diimplementasikan melalui pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan petani, dalam pemberian pelatihan dan keterampilan petani tidak lepas dari bimbingan dan bantuan penyuluh pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak IS selaku sekretaris dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di kabupaten sinjai, beliau mengatakan bahwa:

“ kehadiran dinas dalam hal ini kadang-kadang tidak berani menghimbau petani karna tanaman porang ini merupakan komoditi baru, tetapi kita juga tidak boleh mematahkan semangat petani untuk membudidayakan tanaman porang jadi kami juga memberikan warning semacam kehati-hatian agar jangan berinvestasi terburu-buru karna ketika hukum pasar berlaku kadang harga menurun drastis karna permainan pedang. Kalau kami dari dinas itu sebatas mendampingi dan memfasilitasi artinya tidak

boleh tidak seorang penyuluh kalau petani bertanya tentang komoditi yang lagi tren pasti dikasi informasi seperti apa komoditi baru itu.”

Begitupun yang dikatakan oleh ibu IY selaku kepala seksi produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan bahwa:

“kami dari dinas hanya memfasilitasi petani dalam memperoleh bantuan dan mengarahkan petani untuk mendapatkan bantuan modal usaha, misalkan ke bank. Karna untuk komoditi porang ini masih baru di kabupaten sinjai dan baru mulai dikembangkan oleh pemerintah.”

Adapun yang dikatakan oleh bapak AM selaku koordinator pertanian kecamatan sinjai borong bahwa:

“untuk tanaman porang itu sendiri baru tahun ini dikembangkan karna porang ini merupakan komoditi baru dan baru 1 tahun, kita sebagai pemerintah hanya memfasilitasi petani dan selalu mengadakan penyuluhan untuk memberikan bagaimana tektik-teknik budidaya tanaman porang karna yang masyarakat tau itu cuman cara menanamnya saja dan tidak memperhitungkan bagaimana porang itu agar bisa berumbi yang bagus”

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

“meskipun baru 1 tahun dikembangkan oleh pemerintah tanaman porang khususnya di sinjai borong sangat meningkat karna dulunya itu sekitaran 200 hektar sekarang sudah mencapai 500 hektar, kelompok tani disinjai borong sudah ada 100 kelompok tani yang membudidayakan tanaman porang”

Hal yang sama juga dikatakan bapak SR selaku programmer balai pertanian sinjai selatan bahwa:

“untuk di kecamatan sinjai selatan ini baru sebagian yang produksi karna bibitnya masih langka, kita juga sebagai pemerintah selalu melakukan penyuluhan kepada petani bagaimana cara budidaya tanaman yang baik dan kita juga menganjurkan kepada petani agar menggunakan pupuk organik apa lagi sekarang pupuk mahal.”

Adapun hasil wawancara diatas dengan bapak IS, ibu IY, bapak AM dan bapak SR dapat disimpulkan bahwa kehadiran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang ini sangat penting karena pemerintah selalu siap dalam memberikan informasi kepada petani jika petani bertanya tentang komoditi yang lagi tren. Pemerintah juga siap memfasilitasi dengan mengadakan penyuluhan kepada petani dan juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang cara budidaya tanaman yang baik melalui penyuluhan pertanian.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis terkait indikator peran pemerintah sebagai fasilitator bahwa dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan melalui tim penyuluh, dimana pelatihan yang diberikan pemerintah yaitu cara budidaya tanaman yang baik dan pemerintah juga selalu mengadakan sosialisasi tentang tanaman porang.

2. Peran Pemerintah Sebagai Inovator

Sebagai Inovator pemerintah berperan dalam memberikan inovasi baru dan hal-hal baru kepada petani seperti mengadakan penyuluhan kepada kelompok tani tanaman porang atau mengadakan sosialisai tentang bagaimana cara budidaya tanaman yang baik sehingga dapat mengubah pola pikir petani bahwa adanya inovasi baru dari pemerintah dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil kualitas produksinya, serta dapat meringankan pekerjaan petani dalam pengolahan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu IY selaku kepala seksi produksi TPHP, beliau mengatakan bahwa:

“perannya pemerintah disini hanya memberikan informasi bahwa tanaman ini bagus dan kita juga memfasilitasi petani bagaimana cara budidaya tanaman yang baik. Dinas juga bekerja sama dengan perbankan dimana dalam kerja samanya dalam bentuk kur untuk bantuan modal usaha, aparat desa juga di kabupaten sinjai turut andil dalam hal ini tidak hanya Dinas, nah dimana dinas bersinergi dengan aparat desa melalui penyuluh atau teknis lapangan sehingga aparat desa mempunyai fungsi yang sangat besar dan dapat bekerja sama dengan perusahaan CV Celebes.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak AM bahwa:

“untuk disinjai borong itu sendiri ada lembaga dari perbankan yang masuk ke kelompok tani untuk memberikan bantuan modal usaha kepada petani melalui kur dan ada juga dari perusahaan CV Celebes yang memberikan sosialisasi tentang tanaman porang dan memberikan juga bantuan modal usaha kepada kelompok petani”

Adapun hasil wawancara dari bapak SR bahwa:

“kalau sejauh ini di sinjai selatan itu sendiri belum ada inovasi dari lembaga-lembaga lain, hanya kita saja yang dari balai penyuluhan pertanian yang memberikan inovasi kepada petani agar petani lebih semangat menanam porang.”

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu IY, AM dan SR dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai innovator yaitu pemerintah yang memberikan inovasi kepada petani misalnya bagaimana teknik-teknik budidaya porang dan pemerintah juga melakukan kerjasama dengan perbankan dan CV Celebes, adapun hasil kerjasama pemerintah dimana petani mendapatkan bantuan modal usaha melalui kur.

Untuk lebih jelasnya peneliti mewawancarai bapak AF selaku kelompok tani, beliau mengatakan bahwa:

“kami dari kelompok tani bukit savanna desa batu belereng sudah mendapatkan bibit tanaman porang dari pemerintah sebanyak 1 hektar. Jumlahnya mmng tidak terlalubanyak yah karna seperti yang kita ketahui tanaman porang ini baru mulai dikembangkan oleh pemerintah, harapan kami sebagai petani tanaman porang agar kedepannya pemerintah bisa memberikan bantuan lagi berupa bibit, kami juga berharap agar harga porang ini terus meningkat.”

Peneliti juga mewawancarai salah satu staf balai pertanian sinjai borong ibu KN mengenai masalah bantuan yang didapat kelompok tani, dia mengatakan bahwa:

“kami dari pemerintah sekarang ini sedang mengusahakan agar kami bisa memberikan bantuan berupa bibit ke seluruh kelompok tani, cuman sekarang ini kami masih merencanakan karna tanaman porang ini merupakan komoditi baru, dan baru mau dikembangkan di daerah kabupaten sinjai”

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis terkait indikator peran pemerintah sebagai innovator bahwa dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan memberikan inovasi baru kepada kelompok tani dimana inovasi yang diberikan yaitu teknik-teknik budidaya tanaman porang.

3. Peran Pemerintah Sebagai Modernisator

Sebagai Modernisator pemerintah berperan untuk mengiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial dan kemampuan mengolah kekayaan alam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak SR bahwa:

“kita sebagai pemerintah disini selalu memberikan pelatihan untuk mengolah kekayaan alam yang dulunya cuman jadi sampah kini bisa dimanfaatkan dan diolah jadi pupuk organik apalagi sekarang pupuk makin mahal.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak koordinator AM bahwa:

“kami dari pemerintah selalu mengarahkan para petani kearah modern. misalnya menggunakan teknologi seperti traktor yang di gunakan untuk menggemburkan tanah agar umbi yang akan dihasilkan besar.”

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak SR dan bapak AM mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menjalankan tugasnya sebagai modernisator karena pemerintah berperan aktif dan memberikan tugas kepada penyuluh pertanian yang harus terjun langsung ke kelompok tani untuk memberikan arahan-arahan kepada petani baik dalam bentuk penyuluhan maupun dalam bentuk pendampingan misalnya memberikan pelatihan mengolah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan seperti dalam pembuatan pupuk organik dan penggunaan teknologi seperti traktor.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis terkait indikator peran pemerintah sebagai modernisator bahwa dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan mengarahkan para petani dan memberikan bimbingan untuk menggunakan teknologi berupa traktor untuk menggemburkan tanah.

4. Peran Pemerintah Sebagai Pelopor

Sebagai Pelopor pemerintah harus menjadi panutan untuk seluruh masyarakat dan menjadi pelopor dalam bentuk hal-al positif. Pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan melalui penyuluh pertanian kecamatan sinjai selatan, pemerintah mengenalkan kepada petani bagaimana cara membuat pupuk organik, dalam hal ini balai pertanian bekerjasama dengan balai peternakan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak SR yaitu beliau mengatakan bahwa:

“yahn... kami dari balai pertanian sinjai selatan bekerjasama dengan balai peternakan untuk memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada kelompok tani dengan tujuan pemanfaatan bahan-bahan yang ada, yang dulunya cuman menjadi sampah dan membuat pencemaran lingkungan, kini bisa diolah menjadi pupuk organik dan dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman secara alami.”

Untuk lebih jelasnya peneliti mewawancarai bapak AA selaku kelompok tani kelurahan sanggiaseri mengenai pelatihan dan pemberdayaan apa saja yang telah diterima dari pemerintah balai pertanian kecamatan sinjai selatan.

“yah.. kami terima pelatihan dari pemerintah yaitu membuat pupuk organik di yang dilakukan di halaman kantor balai pertanian, kemarin itu pelatihannya di bimbing langsung oleh penyuluh pertanian. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu kotoran-kotoran ternak, jerami yang sudah dibentuk, dedaunan dan dedak setelah itu dicampur hingga rata terus dimasukkan kedalam lubang supaya cepat menjadi pupuk, saya dan petani lain terus memperhatikan dan ikut serta dalam pembuatan pupuk organik ini, dengan harapan kami bisa buat sendiri nanti.”

Dari wawancara diatas dengan kelompok tani dapat di simpulkan bahwa tujuan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah balai pertanian ini untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, pelatihan yang dilakukan pemerintah ini mendapat respon baik dari kelompok tani karna dapat mengurangi biaya perawatan tanaman dan tanaman juga akan lebih sehat, apalagi sekarang ini biaya pupuk organik lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia. Dengan adanya pembuatan pupuk organik ini semua bahan-bahan seperti jerami, kotoran sapi dan lain-lain yang dulunya cuman diterlantarkan, dengan adanya pelatihan ini semuanya dapat dimanfaatkan dengan cara diolah jadi pupuk organik.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan yang ada diatas mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai dapat simpulkan bahwa pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan kabupaten sinjai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun belum maksimal dikarenakan tanaman porang ini merupakan komoditi baru dan baru mulai dikembangkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis terkait peran pemerintah sebagai pelopor bahwa dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan memberikan bimbingan kepada petani untuk mengolah sumber daya alam yang ada untuk dijadikan pupuk organik dan bisa dimanfaatkan untuk kesuburan tanaman secara alami.

C. Pembahasan

Peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat didalam suatu Negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan hasil penelitian peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. Peran Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah dilaksanakan dengan baik karena pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan selalu memfasilitasi petani dengan melakukan penyuluhan untuk memberikan pendampingan melalui pemberian pelatihan bagaimana teknik-teknik budidaya tanaman porang yang baik agar menghasilkan umbi yang lebih besar, peningkatan keterampilan petani dalam mengolah kekayaan alam dan membantu untuk mendapatkan bantuan bibit porang. Di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Sinjai Borong pembudidayaan tanaman porang sangat meningkat karena sebelum dikembangkan pemerintah tanaman porang hanya sebanyak 200 hektar dan kini setelah dikembangkan mencapai 500 hektar, adapun peningkatan produksinya dari 200 hektar hingga 500 hektar sekitaran 10.000-25.000 ton karna setiap 1 hektar hasil panen mencapai 50 ton. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2000) menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator senantiasa memberikan fasilitas dan pendampingan, yang dimana pendampingan ini

dapat diimplementasikan melalui pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan petani. Teori menurut Yusuf (2014), peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah berpacu pada bidang pendampingan, pelatihan dan pendanaan atau pemberian bantuan modal untuk masyarakat yang diberdayakan.

2. Peran Sebagai Inovator

Peran pemerintah sebagai inovator sudah dilaksanakan dengan baik karena pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Sinjai sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah selalu melakukan penyuluhan untuk memberikan inovasi-inovasi baru kepada petani dalam membudidayakan tanaman dengan baik dan menginformasikan kepada petani bahwa tanaman ini baik dan pemerintah juga memfasilitasi petani dengan cara bekerjasama dengan perbankan dan perusahaan CV Celebes untuk mendapatkan bantuan modal usaha untuk petani. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2000) menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai inovator berperan dalam memberikan inovasi baru dan hal-hal baru kepada petani misalnya pemerintah mengadakan penyuluhan kepada petani tanaman porang atau mengadakan sosialisasi tentang bagaimana cara budidaya tanaman yang baik sehingga pola pikir petani bahwa adanya inovasi baru dari pemerintah dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil kualitas produksinya.

3. Peran Sebagai Modernisator

Peran pemerintah sebagai modernisator dalam pemberdayaan petani tanaman porang di Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan dengan baik dikarenakan pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Sinjai sudah melaksanakan tugasnya dengan cara memberikan pelatihan kepada kelompok tani dalam mengolah kekayaan alam untuk dijadikan pupuk organik dan mengarahkan petani untuk menggunakan teknologi berupa traktor untuk menggemburkan tanaman agar bibit porang yang ditanam akan menghasilkan umbi yang besar. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2000) menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai modernisator menggiring petani kearah modern yakni kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan mengolah kekayaan alam. Teori menurut Nilasari menyatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam terjadinya sesuatu hal.

4. Peran Sebagai Pelopor

Peran pemerintah sebagai pelopor sudah dilaksanakan dengan baik karena pemerintah dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan bekerjasama dengan balai peternakan untuk memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada kelompok tani dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang dulunya cuman jadi sampah yang mencemarkan lingkungan kini sudah bisa diolah dan

dimanfaatkan petani untuk menyuburkan tanaman dengan alami. Dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk organik petani diharapkan membuat pupuk organik sendiri nantinya apalagi sekarang ini pupuk kimia semakin mahal. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik yaitu kotoran-kotoran ternak, jerami yang sudah dibentuk, dedaunan dan dedak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2000) menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai pelopor harus menjadi panutan untuk seluruh petani dan menjadi pelopor dalam bentuk hal-hal positif, pemerintah juga bertugas untuk menjadikan petani tidak mengalami ketergantungan, petani dapat mengusahakan dan memanfaatkan sendiri sumber daya alam yang ada. Teori menurut Van Arsten juga menjelaskan agriculture adalah digunakannya kegiatan masyarakat untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna memanfaatkan untuk tanaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tanaman porang di kabupaten sinjai. Untuk melihat suksesnya peran pemerintah dalam pemberdayaan petani porang di kabupaten sinjai dapat dilihat melalui 4 indikator peran pemerintah yaitu:

1. Peran sebagai fasilitator

Pemerintah dinas Tphp sebagai fasilitator memberikan fasilitas berupa bantuan bibit dan modal usaha kepada kelompok tani sehingga perannya sangat penting, meskipun baru 1 tahun dikembangkan pemerintah budidaya porang di Kabupaten Sinjai sangat meningkat khususnya di Kecamatan Sinjai Borong.

2. Peran sebagai inovator

Pemerintah dinas Tphp sebagai inovator berperan dalam mengadakan penyuluhan kepada kelompok tani tanaman porang dan mengadakan sosialisai sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi budidaya porang, pemerintah dinas tphp dan aparat desa juga turut andil dalam kerjasama dengan perbankan dan CV Celebes dalam rangka memperoleh bantuan modal usaha. Namun ada juga satu

- Imam, M. (2016). Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. *Universitas Mulawarman*, 4(1), 64–77. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4 (1), 2016: 64-67.
- Kinibalu, A. (2019). *Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Marbun, D. N. V.D., Satmoko, S., & Gayatri, S. (2019). Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani Tanaman Hortikultura di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(3), 537–546. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.03.9>
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87–99.
- Miftha, T. (2002). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Nilasari, D. (2017). Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Wewangiuka Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>.
- Pemerintah, K., & Kabupaten, D. (2010). *bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah*; 2008.

- Prasetio, Antoni. (2019). *Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tanjung Jabung Timur*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sondang, P. S. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rnika Cipta.
- Sugiono. (2018). *Meode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfaberta.
- Suroso. (2016). Strategi Pengembangan Komoditi Tanaman Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*) Di Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Diy. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol. 1 19*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- Yusuf, I. (2014). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1*.
- Angrianingsi, W. (2020). *Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.